

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya dan mengemukakan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan penulis mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan. Pada bab ini penulis akan memulai dari mendeskripsikan sumber informasi (informan) kemudian dilanjutkan dengan deskripsi hasil wawancara dan yang terakhir adalah pembahasan. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sebelumnya akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai deskripsi informan.

### **A. Deskripsi Informan**

Sumber informasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Informan atau sumber informasi dalam penelitian ini adalah lima orang yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, yang terdiri dari Kepala Kelurahan Tugusari, Sekretaris Kelurahan Tugusari, mantan kepala desa dan mantan sekretaris desa serta tokoh

masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai data dari informan pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Berikut ini keterangan mengenai informan pada penelitian ini:

**Tabel 5. Deskripsi Informan**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	Sri Muniarti B.sc	51 thn	Pegawai Negeri Sipil	Lurah Tugusari
2.	Junaedi A.Md.	47 thn	Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Kelurahan Tugusari
3.	M. Aruman H.	50 thn	Wiraswasta	Mantan Kepala Desa
4.	Suparno	48 thn	Wiraswasta	Mantan Sekretaris Desa
5.	Iya Wahyu	58 thn	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat /Ketua LPMK

*sumber: data diolah dari hasil penelitian 2009*

Kelima orang di atas adalah informan yang berasal dari beberapa kapasitas yang berkaitan dengan pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat yang dipandang mengetahui serta memahami tentang dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka para informan tersebut dijadikan sebagai sumber data primer melalui wawancara secara langsung.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, melalui wawancara terhadap kelima informan maka dapat ditarik sebuah hasil penelitian mengenai dampak yang terjadi setelah adanya perubahan status desa

menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari adalah sebagai berikut:

### **1. Proses Perencanaan Pembangunan Sebelum dan Setelah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Berikut ini adalah kutipan informan yang berkaitan dengan perbandingan proses perencanaan pembangunan sebelum dan setelah perubahan status desa menjadi kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Muniarti selaku Lurah Tugusari dapat dilihat perbedaan status desa dengan kelurahan terhadap proses perencanaan pembangunan, beliau mengatakan bahwa:

*“..Sebenarnya untuk perubahan status desa menjadi kelurahan dalam hal proses perencanaan pembangunan tidak terlalu tampak perbedaannya dengan pada saat masih menjadi desa. Untuk perencanaan pembangunan sendiri tetap dilakukan dari bawah yaitu melalui musrenbang yaitu musyawarah rencana pembangunan dan selanjutnya hasilnya dibawa pada tingkat kabupaten, tapi kita hanya melakukan usulan saja, apakah nanti diterima atau tidak bukan kita yang menentukan..”* (sumber: wawancara tanggal 26 November 2009)

Hasil wawancara dengan Bapak Iya Wahyu yang merupakan tokoh masyarakat di Kelurahan Tugusari diketahui bahwa:

*“Sekarang ini untuk pelaksanaan pembangunan kelurahan hanya mengandalkan usulan saja kepada pemerintah kabupaten, tapi itu kan bisa diterima tapi bisa aja ditolak. jadi artinya pembangunan saat ini hanya menunggu dari kabupaten saja, sebenarnya saya sih menganggap masih lebih baik saat masih desa dibandingkan sekarang ini yang kelurahan, kelurahan ini juga belum maksimal, kalo untuk*

*pelayanan saya melihat memang ada peningkatan..”*  
(sumber: wawancara tanggal 23 November 2009)

Pernyataan yang hampir sama disampaikan juga oleh Bapak Suparno selaku mantan sekretaris desa, beliau menyatakan bahwa:

*“..Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan dalam hal proses pembangunan tidak terlalu tampak perbedaannya dengan pada saat masih menjadi desa, karena masih juga dilakukan melalui musrenbang..”* (sumber: wawancara tanggal 24 November 2009)

Bedasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Tugusari saat ini tidak berbeda seperti saat masih berstatus menjadi desa dahulu, yaitu perencanaan pembangunan tetap dilaksanakan melalui proses MUSRENBANG yaitu musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, yang kemudian setelah melalui proses musyawarah tersebut hasilnya akan dibawa ke tingkat kecamatan dan setelah itu baru ke tingkat lebih tinggi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Sebagaimana juga yang diungkapkan bapak M. Aruman H. selaku mantan kepala desa, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“..Setahu saya memang setiap tahun di kelurahan mengadakan yang namanya musyawarah rencana pembangunan yang mana nanti hasil kesepakatan dari musyawarah itu dibawa ke kabupaten, tapi kalo dari pemerintah kabupaten tidak melaksanakan program hasil musyawarah tersebut kan sama aja pembangunan di tingkat kelurahan ini ngga bisa berjalan..”*(sumber: wawancara tanggal 15 Maret 2010)

Pernyataan yang hampir sama disampaikan juga oleh bapak Junaedi selaku Sekretaris Kelurahan Tugusari yaitu sebagai berikut:

*“..Dalam hal perencanaan kita kan setiap tahunnya sudah rutin mengadakan musrenbang, setiap melaksanakan musren itu kita melibatkan setiap element masyarakat, contohnya mengundang para toko-tokoh masyarakat di kelurahan kita ini, nah dari hasil musren itu kita memilah-milah juga mana program-program yang memang benar dibutuhkan..”*  
(sumber: wawancara tanggal 15 Maret 2010)

## **2. Perbandingan Antara Proses Pelaksanaan Pembangunan Sebelum dan Setelah Adanya Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Muniarti dapat dilihat perbandingan proses pelaksanaan pembangunan sebelum dan setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, beliau mengatakan bahwa:

*“..Kalau untuk pelaksanaan pembangunan yang jelas untuk kelurahan ini ada yang namanya gerakan BJSB untuk pembangunan kelurahan, untuk kelurahan Tugusari ini kita udah dapat. Kita beda dengan desa untuk pembangunan, kalau kelurahan ini hanya menggunakan dana dari program tersebut. Berbeda sekali dengan desa yang setiap tahunnya dapat dana dari alokasi dana desa..”* (sumber: wawancara tanggal 26 November 2009)

Hasil wawancara dengan Bapak Iya Wahyu selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Tugusari, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“..Saya menganggap kalau perubahan status desa jadi kelurahan cuma sebutan aja, sebenarnya saya datang kesini dulu sekitar tahun 1951 sebutannya masih kampung, kemudian berubah jadi desa, terus pas berlakunya otonomi*

*daerah berubah sebutan jadi pekon dan sekarang kelurahan. Tapi saya perhatikan sekarang setelah berubah jadi kelurahan pun untuk pembangunan belum ada perubahan. Saya melihatnya masih biasa-biasa saja artinya tidak berbeda jauh dengan saat masih jadi desa..”* (sumber: wawancara tanggal 23 November 2009)

Hasil wawancara dengan Bapak Suparno berkaitan dengan perbandingan antara proses pelaksanaan pembangunan sebelum dan setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan diketahui bahwa:

*“..Sekarang ini setelah menjadi kelurahan hanya pada tataran administrasi saja yang tampaknya lebih baik, tapi untuk pembangunan masih berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri dan bukan berasal dari pemerintahan kelurahan, hal itu bisa aja karena kelurahan sekarang tidak punya anggaran pembangunan sendiri seperti waktu masih jadi desa, dulu setiap tahun desa kan dapat ADD ..”* (sumber: wawancara tanggal 24 November 2009)

Sementara bapak M. Aruman H. selaku mantan kepala desa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*“..Sekarang ini kalau ada pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan bersama semisal bangun masjid atau mushola itu rata-rata berdasarkan inisiatif warga sendiri, bukan dari pemerintahan kelurahan artinya masyarakat yang melakukan swadaya..”* (sumber: wawancara tanggal 15 Maret 2010)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan saat ini masih belum sesuai seperti yang diharapkan, selain itu pembangunan juga masih banyak yang belum dapat terlaksana, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan setelah berubah statusnya menjadi kelurahan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak lagi memberikan alokasi dana sebagaimana seperti saat masih berstatus desa dahulu yang diberikan setiap satu tahun sekali dan dalam pengelolaannya dapat digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah Kelurahan Tugusari sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, salah satu contohnya adalah dengan memaksimalkan bantuan yang berasal dari gerakan membangun *beguai jejama sai betik* (Gerbang BJSB) yaitu program yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk pembangunan kelurahan yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan, akan tetapi dana yang didapat masih belum mencukupi untuk dapat melaksanakan seluruh program pembangunan di Kelurahan Tugusari tersebut.

### **3. Hasil Pencapaian Pembangunan Setelah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Muniarti dapat diketahui hasil pencapaian pembangunan di Kelurahan Tugusari setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, beliau mengatakan bahwa:

*“..Sejauh ini kita hanya ada beberapa bentuk pembangunan yang telah terlaksana yaitu pembuatan jalan kewilayah perumahan warga, serta pembuatan jalan menuju lapangan manunggal, lapangan yang biasa digunakan untuk upacara bendera saat agustusan dan kegiatan olahraga. tapi itu semua jauh dari harapan..”* (sumber: wawancara tanggal 26 November 2009)

Hasil wawancara dengan Bapak Iya Wahyu terhadap hasil pencapaian pembangunan di Kelurahan Tugusari setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, beliau mengatakan bahwa:

*“..Barang saya perhatikan sekarang setelah berubah jadi kelurahan untuk hasil pembangunan belum ada perubahan atau kemajuan. saya melihatnya masih biasa-biasa saja artinya tidak berbeda jauh dengan saat masih jadi desa dulu..”* (sumber : wawancara tanggal 23 November 2009)

Hasil wawancara dengan Bapak Suparno berkaitan dengan pencapaian pembangunan setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan diketahui bahwa:

*“..Sebenarnya untuk perubahan status desa menjadi kelurahan dalam hal pembangunannya tidak terlalu tampak perbedaannya dengan pada saat masih menjadi desa, karena dulu juga setiap satu tahun saat masih menjadi desa kita memang dapat ADD dan kita juga sering dapat bantuan dari PLTA yang bisa digunakan untuk pembangunan..”* (sumber: wawancara tanggal 24 November 2009)

Hasil wawancara dengan bapak M. Aruman H. selaku mantan kepala desa mengatakan pendapatnya mengenai hasil pembangunan di kelurahan saat ini, yaitu sebagai berikut:

*“..Perubahan desa menjadi kelurahan sekarang ini saya perhatikan belum terlihat kalau pembangunan yang jadi ukurannya ya mas, kalau saya amati juga kondisi pembangunan sekarang ini belum menonjol, dalam artian tidak ada bedanya waktu jadi desa dulu dibanding sekarang sudah menjadi kelurahan..”* (sumber: wawancara tanggal 15 Maret 2010)

Bapak M. Aruman H. juga menambahkan pernyataan tentang hasil pembangunan di kelurahan saat ini, yaitu sebagai berikut:

*“..Ya seperti yang saya bilang tadi pembangunan sekarang ini belum terlihat hasilnya, malahan kalo pendapat saya pribadi masih mending dulu waktu masih jadi desa, dulu setiap tahun kita selalu melaksanakan program pembangunan walaupun itu bukan pembangunan yang sifatnya besar..”* (sumber: wawancara tanggal 15 Maret 2010)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa hasil yang dicapai dalam pembangunan setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan belum mencapai hasil maksimal, bahkan setelah terjadi perubahan status menjadi kelurahan kondisi pembangunan yang dilaksanakan menjadi menurun, tidak seperti saat masih berstatus menjadi desa. Tidak tercapainya kegiatan pembangunan setelah berubah status menjadi kelurahan tersebut dikarenakan pemerintahan Kelurahan Tugusari sekarang ini tidak lagi mempunyai anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan, tidak seperti saat masih berstatus desa yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi dana yang pada penggunaannya dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Artinya perubahan status desa menjadi kelurahan telah berdampak negatif yaitu dengan terjadi penurunan hasil pencapaian pembangunan di Kelurahan Tugusari.

### **C. Pembahasan dan Analisis Mengenai Dampak dari Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pembangunan.**

Berdasarkan dari jawaban dan keterangan informan pada hasil penelitian, maka dapat diketahui dampak dari perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari adalah sebagai berikut:

#### **1. Proses Perencanaan Pembangunan Sebelum dan Setelah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam suatu organisasi, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan sekecil apapun akan memiliki hasil yang baik jika melalui perencanaan terlebih dahulu, dan tidak akan berhasil dengan baik suatu kegiatan tanpa adanya perencanaan yang baik. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan kunci pertama yang akan membawa berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan dapat diketahui bahwa pada tahapan proses perencanaan pembangunan setelah perubahan status menjadi kelurahan sekarang tidak berbeda saat masih menjadi desa dahulu, yaitu proses perencanaan pembangunan masih tetap dilaksanakan melalui proses MUSRENBANG yaitu musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan di tingkat kelurahan, yang kemudian setelah melalui proses musyawarah tingkat kelurahan

tersebut hasilnya akan dibawa ke tingkat kecamatan, pada tingkat kecamatan akan dilakukan lagi musyawarah rencana pembangunan yang mana pada akhirnya hasil musyawarah tersebut akan diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan tersebut yang menjadi pesertanya adalah dari berbagai kapasitas masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang kondisi dan prioritas rencana pembangunan di kelurahan tersebut. Pada tahapan proses perencanaan pembangunan ini masyarakat di Kelurahan Tugusari masih diikutsertakan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mengenai pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, itu berarti pemerintah kelurahan tetap berusaha untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat tersebut.

Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan kelurahan saat ini tidak berbeda saat masih berstatus desa dahulu, yaitu proses perencanaan pembangunan tetap dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (MUSRENBANG) yang mana hasil dari musyawarah tingkat desa tersebut dibawa ke tingkat kecamatan dan selanjutnya ke tingkat pemerintahan daerah, oleh karena itu dampak akibat perubahan status desa menjadi kelurahan pada tahapan proses perencanaan pembangunan tidak terlihat.

## **2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Sebelum dan Setelah Adanya Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka pelaksanaan adalah kegiatan yang akan membawa sebuah keberhasilan dari suatu rencana yang sudah ditetapkan. Proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kelurahan Tugusari disini merupakan salah satu bentuk dari bagian perencanaan dan pelaksanaan, oleh karena itu tidak hanya aspek perencanaan yang menentukan keberhasilan pembangunan, tanpa adanya pelaksanaan dalam arti kecakapan dan kesiapan dari pelaksana, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, karena perencanaan dan pelaksanaan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan saat ini masih belum sesuai dengan seperti yang diharapkan dan jika dibandingkan dengan saat masih berstatus desa maka pembangunan di kelurahan sekarang ini dapat dikatakan menurun. Pembangunan di Kelurahan Tugusari masih banyak yang belum dapat terlaksana disebabkan karena untuk pemerintahan kelurahan sekarang ini tidak lagi mempunyai dana yang dapat digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan. Pada saat masih berstatus menjadi desa dahulu, setiap tahunnya Desa Tugusari mendapatkan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Barat, yang mana dari keseluruhan alokasi dana tersebut pemerintahan desa dapat menyusun dan menggunakan secara mandiri untuk anggaran pembangunan seperti yang telah dibuat dan tercantum sebelumnya dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPD) yang telah disiapkan untuk jangka waktu satu tahun, sedangkan saat ini pada setiap pelaksanaan program-program pembangunan di Kelurahan Tugusari tentunya harus berasal dan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, karena kedudukan pemerintahan kelurahan saat ini adalah merupakan wilayah administratif atau bagian dari wilayah atau perangkat kerja kabupaten di bawah kecamatan dan jika akan melaksanakan program-program pembangunan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, dana untuk pembangunan kelurahan tersebut adalah berasal dari pemerintah daerah kabupaten, akan tetapi jika pemerintah daerah kabupaten sendiri tidak menyediakan anggaran dana maka dapat dipastikan pembangunan di tingkat Kelurahan Tugusari juga tidak dapat dilaksanakan.

Dikarenakan pemerintahan kelurahan sendiri sekarang ini belum dapat melaksanakan program-program pembangunan, sehingga jika masyarakat memerlukan sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan bersama maka masyarakat di Kelurahan Tugusari mengadakan swadaya untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Sebagai contohnya adalah pembuatan tempat ibadah yang mana dana yang digunakan untuk biaya pembangunan dikumpulkan dengan swadaya masyarakat. Pemerintahan kelurahan membantu hanya pada tahap pemberian izin dan persyaratan-

persyaratan lain yang digunakan agar pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Jika melihat kondisi pelaksanaan pembangunan di kelurahan Tugusari saat ini, maka dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut telah berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Tugusari, hal tersebut karena setelah berubah menjadi kelurahan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan tidak berjalan dengan maksimal.

### **3. Hasil Pencapaian Pembangunan Setelah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.**

Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang bersumber dari kelima informan dan hasil observasi peneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan, diketahui bahwa dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut telah menyebabkan dampak negatif terhadap hasil pencapaian pembangunan di Kelurahan Tugusari saat ini, karena setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut proses penyelenggaraan pembangunan justru mengalami penurunan. Tidak tercapainya kegiatan pembangunan setelah berubah status menjadi kelurahan disebabkan karena untuk pemerintahan Kelurahan Tugusari sekarang ini tidak lagi mempunyai anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan. Pemerintahan Kelurahan Tugusari sekarang ini hanya bergantung pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam

hal pembangunannya, hal tersebut terjadi karena setelah berubah status menjadi kelurahan maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri seperti saat masih berstatus sebagai desa sudah tidak dimiliki lagi. Kekayaan dan potensi wilayah yang berada di Kelurahan Tugusari saat ini juga sudah tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan kelurahan sendiri dikarenakan setelah berubah status menjadi kelurahan maka struktur Pemerintahan Tugusari telah berubah menjadi wilayah kerja sebagai bagian dari perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang letaknya berada di bawah Kecamatan Sumber Jaya yang sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri seperti saat masih berstatus desa yang sifatnya otonom.

Sebelum keluarnya Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat nomor 17 tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan serta struktur organisasi dan tata kerja kelurahan kegiatan pembangunan di Tugusari dapat berjalan secara rutin setiap tahunnya, yaitu dengan menggunakan dana bantuan desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang mana dalam penggunaannya dana yang didapat oleh pemerintahan desa tersebut sebanyak 70% dialokasikan sebagai dana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sedangkan sisanya sebanyak 30% lagi digunakan sebagai dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sehingga terlihat bahwa pada saat masih berstatus desa pembangunan menjadi prioritas utama dari penggunaan dana tersebut.

Berikut ini adalah Perbandingan hasil pembangunan yang telah terlaksana oleh pemerintahan desa dalam kurun waktu empat tahun sebelum adanya perubahan status desa menjadi kelurahan dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dalam kurun waktu empat tahun setelah ditetapkannya desa menjadi kelurahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6. Perbandingan Hasil Pembangunan Fisik Saat Masih Berstatus Desa dan Setelah Menjadi Kelurahan**

No.	Hasil Pembangunan Saat Masih Berstatus Desa	Hasil Pembangunan Setelah Menjadi Kelurahan
1.	Pembangunan jembatan di Lingkungan Margawangi I	Pembuatan jalan ke wilayah perumahan warga di Lingkungan Margawangi II
2.	Pembuatan saluran air bersih di Lingkungan Margalaksana	Pembuatan jalan menuju lapangan Manunggal
3.	Pembangunan gorong-gorong dan <i>drainase</i> di Lingkungan Tugusari II	
4.	Pembuatan jalan menuju kompleks perumahan warga di Lingkungan Margalaksana	

*sumber: data diolah dari hasil penelitian 2010*

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dilihat bahwa setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, hasil pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kelurahan Tugusari mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil pembangunan saat masih berstatus desa dahulu. Setelah berubah status menjadi kelurahan, pemerintahan Kelurahan Tugusari sebenarnya sudah melaksanakan beberapa program pembangunan untuk kepentingan masyarakatnya, akan tetapi jika melihat kondisi hasil pembangunan

yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan Tugusari tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di Kelurahan Tugusari saat ini masih tergolong rendah, mengingat perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut sudah berjalan sekitar empat tahun sejak ditetapkan dan diresmikannya kelurahan tersebut.

Pemerintahan Kelurahan Tugusari sebenarnya sudah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi rendahnya pencapaian pembangunan, diantaranya adalah dengan memaksimalkan bantuan dana yang berasal dari program gerakan membangun *beguai jejama sai betik* (Gerbang BJSB) yang didapat pemerintahan kelurahan setiap tahunnya yang dimulai sejak tahun 2006 dan berlangsung selama lima tahun kedepan. Metode yang dilakukan dalam menjalankan program Gerbang BJSB ini adalah dengan cara menyalurkan bantuan dana stimulan melalui dana bantuan langsung kepada kecamatan, selanjutnya kecamatan akan mendistribusikan ke kelurahan terpilih sesuai dengan keputusan Bupati Lampung Barat, selain program Gerbang BJSB, Kelurahan Tugusari juga mendapat bantuan yang berasal dari program gerakan membangun bersama rakyat (GMBR) yang merupakan program lanjutan dari program pembangunan BJSB, akan tetapi program tersebut masih belum cukup untuk meningkatkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan karena sebagian dana tersebut digunakan juga sebagai dana perawatan dan pemeliharaan rutin untuk fasilitas-fasilitas umum yang telah ada.

Usaha lainnya yang dilakukan guna dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut adalah Kelurahan Tugusari juga telah mengajukan berupa usulan rencana program untuk pembangunan di wilayah Kelurahan Tugusari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, namun pemerintah daerahnya sendiri masih kurang memberikan tanggapan terhadap usulan dari Kelurahan Tugusari tersebut, sehingga sampai sekarang kondisi pembangunan di Kelurahan Tugusari masih belum berjalan dengan maksimal.